

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Konflik yang terjadi di kawasan timur tengah sudah menjadi masalah yang tak terpisahkan dari kehidupan di wilayah timur tengah. Tak hanya konflik eksternal, namun konflik internal juga mungkin terjadi di dalam sistem pemerintahan Israel. Konflik eksternal yang sering mencuat dan masih menjadi pertanyaan dunia Internasional berkait dengan batas wilayah dengan Palestina. Masalah Israel-Palestina yang berkekat dalam perebutan wilayah adalah sebuah konflik yang seakan-akan tidak dapat di hentikan.

Di sisi lain, selain menghadapi sebuah konflik eksternal, yaitu masalah penetapan batas wilayah Israel-Palestina. Israel juga mengalami konflik internal dalam sistem pemerintahan. Yaitu dalam proses demokratisasi di Israel. Dilema dalam negri yang muncul dan menambah konflik adalah tindakan Perdana Menteri Ariel Sharon yang mencetuskan sebuah Partai baru. Yaitu Partai kadima, sebagai rivalitas Partai Likud dalam pemilihan umum.

Dalam sejarah pemilihan umum di Israel, ada dua Partai besar yang mendominasi dalam perolehan suara, yaitu Partai Likud dan Partai Buruh. Partai Likud adalah sebuah Partai politik sayap kanan di Israel. Partai Likud didirikan pada tahun 1973 yang merupakan hasil gabungan Partai *La'am* dan *Gahal*, Likud menganut ideologi konservatif dan nasionalis¹. Kemudian sebagai saingan berat

¹ <http://id.wikimedia.org/wiki/...>

Partai Likud adalah Partai Buruh. Yaitu sebuah Partai politik di Israel yang merupakan Partai Zionis aliran demokrasi sosial dan sosialis, anggota Internasional Sosialis dan anggota pemantau Partai Sosialis Eropa².

Sejalan dengan perkembangan dinamika politik dalam negeri Israel. Ariel Sharon yang merupakan politikus ternama di Israel, Perdana Menteri dan juga pimpinan Partai Likud, menyatakan mundur dari kepemimpinan Partai Likud dan kemudian membentuk sebuah Partai baru berhalauan tengah yaitu Partai Kadima.

Seiring dengan jalannya waktu, semakin banyak perbedaan visi antara Sharon dengan Likud. Kini Sharon di anggap mulai lunak, sedangkan banyak tokoh nasionalis Partai Likud yang bergaris keras. Pengunduran diri Ariel Sharon sebagai pimpinan Partai Likud terjadi pada hari senin tanggal 21 november 2005 lalu³.

Perkembangan dan kenyataan di lapangan memaksa Sharon untuk berpikir ulang atau mengubah visi politiknya. Permusuhan dengan Palestina tidak boleh dibiarkan terus berputar tanpa henti. Darah tidak boleh tumpah di bumi Palestina. Perdamaian harus diwujudkan.

Sharon memutuskan untuk mengosongkan seluruh permukiman di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat kemudian menyerahkan wilayah permukiman Yahudi itu kepada Palestina. Keputusan itu mulai dilaksanakan pada bulan agustus tahun 2005 lalu⁴. Padahal Sharon telah berulang kali menegaskan keputusannya untuk tetap terikat rencana peta jalan yang di dukung Internasional dan menyerukan perundingan kesepakatan perdamaian dengan negara Palestina.

² *Ibid.*

³ <http://www.harian media.com>, di unduh tanggal 25 November 2005.

⁴ <http://www.harian media.com>, di unduh tanggal 25 November 2005.

Kebijakan Sharon itu ditentang banyak pihak, termasuk sejumlah tokoh di Partai Likud. Yang juga menduduki jabatan dalam Knesset, sebuah parlemen di Israel. Reaksi itu di tunjukkan oleh Menteri Keuangan Benjamin Netanyahu yang mundur dari jabatannya sebagai ungkapan menentang kebijakan Sharon. Kekisruhan di dalam Partai Likud mendorong Sharon keluar dari Partai Likud dan membentuk Partai baru, Kadima. Partai Likud pun pecah, ada pihak yang mengikuti jejak Sharon, namun banyak juga yang masih bertahan di dalam Partai Likud. Keputusan Sharon itu mendapat dukungan banyak pihak, baik dari anggota Partai Likud sendiri maupun dari Partai Buruh yang sejalan dengan pemikiran Sharon tersebut (misalnya Shimon Perez)⁵.

Langkah Sharon dengan Partai Kadima ini merupakan lompatan besar dalam kiprah politiknya. Ia menanggalkan baju politisi kanan garis keras, superhawk yang selalu berpegang pada visi politik Israel Raya (dengan Partai Likud nya) dan kemudian mengenakan baju politisi bergaris moderat, dari kanan ke tengah dengan menggunakan alteleri Partai Kadima yang ia rintis 21 November 2005 lalu. Meskipun dalam sejarah Israel, Partai baru beraliran tengah selalu gagal mendapat dukungan dari rakyat Israel.

Seperti halnya Pendiri Negara Israel David Ben Gurion dahulu pernah gagal mendapat dukungan rakyat atas Partai tengah yang ia didirikan. Contoh lainnya adalah Mantan Menhan Israel Moshe Dayan, mantan Menhan Ezer Weizman, dan mantan Kepala Staf AB Israel Moshe Shahak juga gagal mendapat dukungan massa ketika mereka mendirikan Partai beraliran tengah. Kenyataan

⁵ <http://www.kompas.com> Edisi Senin 23 Januari 2006, diunduh tanggal 18 Juli 2007.

pahit para pendahulu Sharon itu tidak mengendorkan niatnya untuk terus maju. Perubahan sikap politik Sharon itu menerbitkan harapan akan lahirnya perdamaian di Timur Tengah, walau tetap harus meniti jalan panjang dan terjal.

Namun selang beberapa bulan setelah Sharon mencetuskan jalan damai dengan Palestina dengan Partai Kadimanya, Sharon harus absen dari dunia politik Israel karena terserang stroke dan harus menjalani operasi. Posisinya sebagai Perdana Menteri dan sekaligus ketua Partai Kadima di limpahkan kepada rekannya, yaitu Ehud Olmert. Kini Olmert mewarisi ide Sharon untuk melanjutkan proses perdamaian antara Israel dengan Palestina dengan Kadimanya. Dengan platform mengusung perdamaian dan menetapkan batas akhir wilayah Israel-Palestina yang direncanakan mencapai final di tahun 2008.

Banyak kebijakan-kebijakan yang telah di usung oleh Partai Kadima yang mengarah pada proses perdamaian antara Israel dengan Palestina. Namun usaha-usaha tersebut tidak berjalan secara lancar. Banyak kalangan politisi dan massa Israel yang menentang kebijakan tersebut. Namun tidak sedikit pula yang mendukungnya. Fenomena tersebut sangat menarik untuk di telusuri lebih lanjut. Hal itulah yang mendorong penulis untuk mewujudkan sebuah penulisan skripsi dengan judul :

"Uraian Partai Kadima dan Perannya dalam Proses Perdamaian antara Israel dan Palestina"

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Menelusuri lebih lanjut tentang langkah Partai Kadima bentukan Ariel Sharon dalam mewujudkan misi perdamaian di timur tengah khususnya perdamaian antara Israel dengan Palestina.
2. Memberikan sebuah pemahaman bahwa proses perdamaian tidak harus dilakukan dengan jalan *coercive diplomacy* / kekerasan di gunakan sebagai alat untuk bernegosiasi. Akan tetapi dengan proses negosiasi damai yang menghasilkan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.
3. Memberikan kontribusi pada dunia pendidikan dalam menyajikan data-data atas permasalahan yang terjadi.

C. Latar Belakang Masalah

Bila kita berbicara mengenai wilayah Timur Tengah, maka yang pertama kali muncul di benak kita adalah sebuah konflik, perang dan perebutan wilayah. Memang itulah yang sebenarnya terjadi di timur tengah. Konflik yang terjadi di wilayah tersebut seakan akan sudah menjadi masalah yang tak terpisahkan dari kehidupan di wilayah tersebut.

Konflik antara Israel dengan Palestina adalah salah satu contoh yang sangat menarik untuk di telusuri. Negara-negara Arab mulai melakukan perlawanan pada waktu awal terbentuknya negara Irael, yaitu pada tanggal 14 Mei 1948 seiring dengan proklamasi negara Yahudi oleh David Ben Gurion. Lantas

hari (Six Day War), perang Yom Kippur 1973 serta serangan Israel ke Libanon untuk mengusir Palestine Liberation Organization (PLO) pada tahun 1982⁶. Itulah serentetan tindakan kekerasan yang mewarnai kawasan timur tengah. Seakan akan masalah perdamaian masih jauh untuk di perbincangkan.

Namun demikian usaha untuk membentuk sebuah perdamaian di timur tengah masih terus di upayakan oleh berbagai pihak. Baik oleh para pemimpin antar negara-negara di kawasan tersebut maupun oleh pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator. Dalam hal perdamaian antara Israel dengan Palestina, usaha untuk membuka negosiasi untuk mengakhiri sebuah konfrontasi sudah kerap sekali di usahakan. Melalui perjanjian-perjanjian perdamaian yang di usahakan bersama maupun melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Akhir-akhir ini dinamika politik dalam negeri Israel mengalami perubahan yang sangat berbeda. Hal itu terjadi setelah figur politik mereka, Ariel Sharon membuat sebuah kebijakan yang sangat mengejutkan pemerintahan Israel. Pada tanggal 2 Februari 2004, Ariel Sharon yang terpilih menjadi Perdana Menteri untuk kali ke 2 pada pemilu 28 Januari 2003, secara mengejutkan mengeluarkan kebijakan menarik mundur semua pemukiman Yahudi yang berjumlah 21 yang juga merupakan rumah bagi sekitar 8000 pemukim Yahudi yang hidup di antara 1,3 juta orang Palestina dari Jalur Gaza serta pemukim Yahudi lainnya dari 4 pemukiman kecil di Tepi Barat bagian utara sebagai tambahan⁷.

Tindakan politis Sharon tersebut merupakan sebuah perubahan yang sangat mendasar dalam visi seorang Sharon. Kebijakan tersebut merupakan

⁶ Mustafa abd. Rahman, Dilema Israel, Antara Krisis Politik Dan Perdamaian, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002, hal xxx.

⁷ <http://www.berita.com>

sebuah langkah awal dalam menciptakan sebuah perdamaian dengan Palestina. Hal serupa pernah di lakukan oleh pendahulunya yaitu PM Yitzak Rabin. Yang juga menginginkan adanya sebuah perdamaian antara Israel dengan Palestina.

Konsep perdamaian yang di cetuskan oleh PM Yitzak Rabin di laksanakan dengan melaksanakan kesepakatan damai yang di tandatangani mulai dari kesepakatan Oslo I di Washington yang intinya adalah menyerahkan Jalur Gaza dari kota Jericho kepada Palestina⁸. Ksepakatan Oslo I antara Israel dengan PLO pada tanggal 13 September 1993 merupakan terobosan yang spektakuler dalam mendorong proses perdamaian dan mengakhiri konflik Israel dengan Palestina. Dalam kesepakatan Oslo I, Israel bersedia menarik pasukannya dari Jalur Gaza dan Jericho yang sejak tahun 1967 mereka duduki⁹. Itulah terobosan baru yang di usung Rabin untuk perdamaian.

Untuk mendukung kesepakatan Oslo I, Rabin kemudian melanjutkan kesepakatan Kairo sampai kesepakatan Oslo II. Dengan berbagai kesepakatan tersebut, maka Palestina merupakan negara Arab ke tiga yang secara resmi berdamai dengan Israel. Negara Arab yang sebelumnya berdamai dengan Iserael adalah Mesir (1979) dan Yordania (1994)¹⁰. Namun agaknya cita-cita perdamaian tersebut mengalami kegagalan yang sangat di sayangkan. Pupusnya perdamaian Israel-Palestina di sebabkan karena terbunuhnya PM Yitzak Rabin

⁸ Mustafa abd. Rahman, *Dilema Israel, Antara Krisis Politik Dan Perdamaian*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002, hal 19

⁹ ...

pada tanggal 4 November 1995 oleh seorang pemuda, Yigal Amir dari kaumnya sendiri yang menolak usaha perdamaian Rabbini¹¹.

Hingga saat ini konflik 57 tahun Israel-Palestina tetap menghangat, dan perdamaian terus tertunda. Setelah 12 tahun Perdamaian Oslo ditandatangani di Camp David, Amerika Serikat. Pemilu Palestina Januari 1996, melegitimasi pemerintahan interim pimpinan mendiang Arafat, dan mulailah perjuangan Palestina Merdeka. Perdamaian Madrid (1991), Perdamaian Oslo I, II (1993 dan 1994) dengan implementasi Perjanjian Taba (1995), hanyalah babak baru sejarah dalam upaya penyelesaian konflik panjang kedua bangsa, yaitu antara Israel-Palestina¹².

Pemerintahan Buruh Israel oleh Shimon Peres dan Ehud Barak (1995-1998), diselingi PM Netanyahu dari Partai Ultrakanan Likud (1998-2000), gagal menggalang sebuah jalan perdamaian kedua bangsa tersebut. Tahun 2000-2005, mediator utama Washington menyadari hambatan perdamaian itu. Tahun 2002 AS bersama tiga pihak (Uni Eropa, PBB dan Rusia) merintis Peta Jalan Damai. Peta Jalan Damai intinya mirip Perjanjian Oslo, menekankan pengembalian 3,5 juta pengungsi, pembebasan 5.000 tahanan Palestina, dan pembentukan Palestina Merdeka (Mei 2005). Roadmap Toward Peace (Peta Jalan Damai) praktis terhenti¹³. Karena PM Ariel Sharon dan Washington menolak kepemimpinan Arafat yang dianggap korup dan membiarkan terorisme kaum militan. Setelah Ariel Sharon menjabat sebagai Perdana Menteri tahun 2001. Dia menolak prinsip

¹¹ Mustafa abd. Rahman, *Dilema Israel, Antara Krisis Politik Dan Perdamaian*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002, hal 26

¹² <http://www.sinarharapan.com>, Aco Manafe, artikel berjudul "Perdamaian Timur Tengah Yang

(penyerahan) “Tanah untuk Perdamaian”. Artinya Sharon menolak melepaskan Jalur Gaza dan Tepi Barat yang menurut Torah Yahudi (Taurat) adalah Negeri Yudea dan Samaria. Memang inilah sikap Partai Ortodoks Likud sebagai ultra-nasionalis Yahudi, yang konsisten memperjuangkan Zionisme - kembalinya Israel ke Tanah Perjanjian.

Dari pengalaman sejarah antara Israel dengan Palestina, langkah perdamaian selalu mengalami jalan buntu. Kesepakatan yang di galang oleh PM. Yitzhak Rabin melalui Perjanjian Oslo kandas dengan cara di bunuh oleh ekstrimis dari kalangannya sendiri. Padahal Rabin adalah tokoh Israel moderat yang mencita-citakan perdamaian. Generasi penerusnya adalah Shimon Peres yang menggantikan jabatan Perdana Menteri, yang juga mempunyai pemikiran sama dengan Rabin. Rencana perdamaian kembali menjadi topik pembahasan politik Israel kala itu. Namun sangat disayangkan, Partai Buruh mengalami kekalahan dalam pemilu 1996. Peres dikalahkan oleh Pemimpin Partai Likud, Benyamin Netanyahu yang beraliran keras dan selalu menentang langkah Rabin. Maka dari itu, selama Netanyahu berkuasa proses perjanjian tidak berjalan mulus.

Namun tak berselang lama, setelah Sharon kembali menjabat sebagai Perdana Menteri terpilih dalam pemilu tahun 2003, Sharon mengemukakan konsep yang sangat kontroversi, yaitu dengan menarik diri dari Gaza dan sebagian Tepi Barat bagian utara. Mungkin inilah sebuah perubahan visi seorang Sharon dari yang radikal mengarah ke moderat. Hal itu membuat dinamika politik dalam negeri semakin panas. Terutama di tubuh Partai Likud yang ia pimpin. Likud adalah sebuah Partai politik sayap kanan di Israel. Didirikan pada tahun 1973 hasil

gabungan Partai *La'am* dan *Gahal*, Likud menganut ideologi konservatif dan nasionalis¹⁴. Dengan kata lain visi Sharon kin telah melenceng jauh dari visi Partai Likud yang menentang keras pembagian wilayah dengan Palestina.

Disengagement Policy dari Gaza dan sebagian Tepi Barat yang di kumandangkan Sharon mendapat kecaman keras dari dalam tubuh Partai Likud. Menteri Keuangan yang juga mantan PM Israel Benjamin Netanyahu pada 7 Agustus 2005 mengundurkan diri dari kabinet Sharon karena menolak kebijakan tersebut.¹⁵ Kebijakan Sharon tersebut ternyata menyebabkan konfrontasi keras antar sesama Yahudi di Israel. Bahkan konfrontasi tersebut melibatkan dua kubu yang sama-sama di kenal Konservatif atau garis keras. Sharon dan Partai Likudnya di kenal sebagai kubu garis keras jika di bandingkan dengan Partai saingan utamanya yaitu Partai Buruh.

Tekanan yang di hadapi Sharon dari Partai Likud tidak membuyarkan semangat idealismenya dalam melaksanakan Disengagement Policy. Bahkan Sharon sempat memberhentikan 2 menteri dalam kabinetnya yang ikut menolak kebijakannya tersebut dan yaitu Benny Elon dan Avigdor Lieberman yang keduanya merupakan ekstremist dari Union party. Tujuannya tidak lain adalah untuk menggalang suara bagi Sharon untuk memuluskan rencananya.

Dan akhirnya, sejalan dengan berjalannya waktu, tekanan dan kecaman baik dari dalam Partai Likud maupun dari rakyat Israel yang kontra dengan kebijakan Gaza disengagement plan, Sharon pun berkeputusan untuk keluar dari Partai Likud dan membentuk sebuah Partai baru. Pada tanggal 21 November 2005

¹⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Likud> 25 November 2005

¹⁵ Dina Sihbudi, *Memorandum Timor Tengah*, Jakarta: Mimbar, Juni 2007, hal. 1000

Sharon memprakarsai berdirinya Partai baru berhaluan tengah dengan nama Kadima¹⁶. Kadima telah menyodorkan tawaran baru kepada rakyat Israel menyangkut proses perdamaian yang pada ujungnya menyepakati pembentukan Negara Palestina¹⁷. Itulah visi Partai Kadima yang bejalan lebih moderat di bandingkan dengan Partai ultranasionalis Likud. Barangkali ini merupakan cerminan bahwa rakyat Israel juga sudah bosan dengan konflik dan pertumpahan darah.

Namun karier politik Sharon terhenti karena mengalami stroke dan harus di rawat secara intensif. Sangat kecil kemungkinan bagi Sharon untuk kembali berkiprah di dunia politik Israel, apalagi memimpin Partai Kadima nya dengan platform perdamaian yang sangat berat. Tampuk kepemimpinan pun di limpahkan kepada rekannya, Wakil Perdana Menteri Ehud Olmert sebagai pejabat Perdana Menteri yang juga di beri wewenang untuk memimpin Kadima¹⁸.

Olmert resmi menjabat Perdana Menteri sejak 13 April 2006 secara penuh semenjak menerima penunjukannya pada 4 Januari 2006 setelah Perdana Menteri Ariel Sharon mengalami stroke. Praktis, semenjak itu Olmert menjabat sebagai Perdana Menteri Sementara. Sebelumnya, Olmert adalah Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Industri, Perdagangan dan PerBuruhan yang bertanggung jawab atas Administrasi Tanah Israel¹⁹. Olmert juga adalah anggota Partai Kadima yang dipimpin oleh Ariel Sharon. Melalui pemilu yang diadakan pada 28 Maret 2006, Partai Kadima menang, dan pada 14 April secara resmi

¹⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/ariel_sharon_bibiografi. di unduh 25 Juni 2007

¹⁷ <http://www.komas.com>. Trias Kuncahyono, Edisi 18 Desember 2005, di unduh 20 Juli 2007.

¹⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/ariel_sharon_bibiliografi di unduh 25 Juni 2007

¹⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/ariel_sharon_bibiliografi di unduh 25 Juni 2007

Olmert dilantik sebagai Perdana Menteri. Ia juga pernah menjabat sebagai Walikota Yerusalem.

Dalam memimpin Kadima, Olmert bertekad untuk melanjutkan cita-cita Ariel Sharon. Olmert yang bergabung dengan Sharon dan kini menggantikan Sharon, ingin melakukan langkah yang sama. Saat ini, keinginan Olmert untuk mundur dari sejumlah wilayah Tepi Barat mendapat dukungan Partai sayap kiri, Mertz, dan kubu kiri-tengah, Buruh²⁰.

Partai Kadima yakin bahwa kemajuan pembicaraan perdamaian dengan Palestina adalah tujuan utama seperti yang tercantum dalam kerangka kerja Kadima. Itu kali pertama Kadima menyatakan pedoman kerjanya sejak didirikan, dengan menekankan penyelesaian sengketa panjang Israel-Palestina melalui pembentukan dua negara seperti dinyatakan dalam rencana jalan damai antarbangsa.

Dengan program utama berkenaan dengan perdamaian dan penetapan batas akhir dengan Palestina, Kadima semakin mendapat dukungan yang relatif besar dari masyarakat Israel. Bahkan popularitasnya semakin tinggi sehingga dalam poling-poling yang dilakukan oleh media Israel, Kadima memperoleh suara yang tinggi dibandingkan dengan Partai-Partai yang telah berkuasa relatif lama di Israel yaitu Likud dan Buruh.

Rakyat Israel percaya bahwa Kadima yang di dirikan oleh Sharon akan membawa perubahan pada tatanan politik Israel. Banyak dukungan diarahkan pada Kadima. Masyarakat semakin simpati dengan Partai Kadima semenjak

foundingnya, Ariel Sharon mengalami koma yang hingga kini tak kunjung sembuh. Rasa simpati masyarakat Israel dikarenakan juga misi dan visi Kadima yang semakin moderat terhadap perdamaian, karena sebagian besar rakyat Israel telah bosan dengan peperangan antara Israel dan Palestina.

Masyarakat memberikan kepercayaan kepada Kadima karena rakyat Israel masih sinisnya terhadap Partai Likud Benjamin Netanyahu karena kebijakannya yang kurang populer yang berakibat merugikan kaum fakir miskin ketika menjabat Menteri Keuangan pada masa PM Sharon. Sedangkan kurang percaya rakyat Israel pada Pemimpin Partai Buruh Amir Peretz karena Amir Peretz yang berasal dari Maroko dan kurang disukai oleh kaum Ashkenazi (Yahudi dari barat) karena Peretz dari kaum Shephardim (Yahudi dari timur). Kaum Ashkenazi melihat Peretz tidak layak memimpin Israel. Factor lain yang mempengaruhi legitimasi masyarakat kepada Kadima yaitu turunnya poling suara Partai berhaluan Kanan Tengah, Partai Shinui. Peran poling-poling dari media massa Israel sangat besar terhadap masyarakat. Bisa dipastikan para pemilih Partai Shinui akan lari ke suara Kadima.²¹

Dalam sistem politik Israel, Partai Politik mempunyai andil yang sangat besar dalam sebuah pengambilan keputusan. Baik dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri maupun politik dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan partai yang menang dalam sebuah pemilihan di Israel akan memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan Kabinet di Israel, yang mengisi porsi Knesset, sebuah lembaga pemerintahan di Israel. Sehingga praktis kursi di Knesset mayoritas

²¹ <http://www.kompas.com>

adalah anggota partai pemenang pemilu. Apalagi partai yang menang dalam pemilu tersebut memperoleh suara mutlak, atau 50 persen plus 1.²² Maka dominasi partai akan semakin terlihat. Hal itu memungkinkan ketua partai pemenang pemilu akan terpilih menjadi seorang Perdana Menteri, yang mempunyai kontribusi yang besar dalam pemerintahan.

Kondisi seperti itulah yang memperlihatkan bahwa arah kondisi politik di Israel akan ditentukan oleh partai apa yang menang dalam pemilu di Israel, dan berapa banyaknya kursi yang di dapat. Kebijakan yang diambil tidak akan jauh dari apa yang telah di sodorkan semasa kampanye, dan platform yang melekat di tubuh partai tersebut.

Sebagai contoh ketika Partai Buruh menang dalam pemilu dan berkuasa, secara otomatis Yitzhak Rabin menjadi Perdana Menteri. Partai Buruh yang dikenal moderat secara praktis mengusung kebijakan yang lebih *soft* dari pada Partai Likud yang dikenal nasionalis, konservatif dan berhalauan garis keras. Hal itu terbukti dengan terwujudnya Kesepakatan Oslo yang merupakan cikal bakal perdamaian antara Israel dengan Palestina. Otomatis ketika pemerintahan dipimpin oleh Yitzhak Rabin maupun penerusnya Shimon Peres, pembicaraan damai terus digulirkan. Namun, hal itu menjadi berbeda ketika partai Likud memenangkan dalam pemilu 1995, Benyamin Netanyahu menang dalam pemilihan umum dan pembicaraan damai terhenti.²³ Itu adalah sebuah bukti bahwa partai politik di Israel memberikan kontribusi yang besar atas kebijakan-kebijakan yang di keluarkannya.

²² <http://www.guardian.co.uk/israel/political/system.html> di unduh 27 Agustus 2007

perdamaian antara Israel dengan Palestina. Baik dalam sistem pemerintahan untuk membentuk Knesset setelah pemilu 28 Maret 2006, maupun melalui politik luar negerinya dengan pemerintahan otoritas Palestina. Yang di wujudkan dengan berbagai macam negosiasi dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas maupun dengan PM Salam Fayad. Kebijakan luar negeri yang di putuskan oleh Kadima (dari Sharon sampai Olmert) antara lain Gaza disengagement plan, pengucuran uang oleh Israel dari hasil pajak, pembebasan 250 tahanan, pemberian amnesti pada kelompok fatah yang selama ini di cari Israel, berbagai langkah gencatan senjata, dan menggelar pertemuan rutin antara Abbas dengan Olmert. Usaha tersebut merupakan sebuah langkah untuk menyelesaikan konflik dengan cara menciptakan suasana damai dengan sebuah konsep Disarmament, Demobilisasi dan Reintegrasi yang telah banyak dilakukan oleh banyak negara untuk menyelesaikan sebuah konflik.

D. Pokok Permasalahan

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengambil pokok dari permasalahannya, yaitu sebagai berikut : “ **Apa kebijakan Partai Kadima dalam menciptakan proses perdamaian antara Israel dengan Palestina?**”.

E. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Jadi ,

yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.²⁶

Dalam hal ini, penulis menggunakan beberapa konsep/teori sebagai acuan, yaitu :

Konsep Disarmament, Demobilization dan Reintegrasi (DDR)

Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) adalah suatu strategi terapan untuk menjalankan program penjagaan keamanan. Dan konsep atau pendekatan tersebut pada umumnya merupakan strategi yang sering di gunakan oleh PBB melalui program penjagaan keamanan.²⁷

Disarmament merupakan pemindahan senjata secara fisik dari para bekas tentara yang beritkai, baik senjata maupun peluru. Mengumpulkan senjata dari para gerilyawan dan/atau komunitas. Senjata tersebut kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang, yang bertanggung jawab untuk menyimpannya dengan aman, mendistribusikannya kembali atau bahkan menghancurkannya.

Demobilization merupakan kebalikan dari rekrutmen (mobilisasi) gerilyawan sebuah kelompok bersenjata; membubarkan sebuah unit bersenjata, mengurangi jumlah gerilyawan dalam sebuah kelompok bersenjata, atau tahap sementara sebelum membubarkan seluruh kekuatan bersenjata, baik yang reguler maupun yang non reguler.

Sedangkan Reintegrasi adalah proses di mana mantan gerilyawan mengubah identitas dan sumber pendapatannya dari militer ke sipil. Pada

²⁶ Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Inernasional, Disiplin Dan Metodologi, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 185.

²⁷

umumnya, menciptakan perdamaian pasca konflik merupakan pekerjaan yang rumit mencakup pencapaian kondisi lingkungan yang aman, penguatan pemerintahan yang memiliki legitimasi, mendorong revitalisasi ekonomi dan sosial, dan peningkatan rekonsiliasi masyarakat.

Kegagalan dalam menyelesaikan demobilisasi dan reintegrasi, dan kegagalan menciptakan reintegrasi berkelanjutan, dapat menghancurkan perdamaian karena mantan gerilyawan mungkin akan kembali menggunakan kekerasan sebagai cara yang mereka kenal untuk bertahan hidup.

Perlucutan senjata dan demobilisasi merupakan proses jangka pendek untuk memisahkan para gerilyawan dari senjata-senjata mereka dan struktur-struktur militer, sementara reintegrasi merupakan proses yang lebih rumit dan berjangka panjang. Proses tersebut membantu para bekas gerilyawan agar bisa kembali masuk ke dalam struktur social ekonomi komunitas di mana mereka berasal, atau komunitas-komunitas baru.

Kunci keberhasilan DDR terletak pada integrasi tujuan-tujuan jangka pendek dan panjang ini sebagai bagian dari transisi konflik menuju perdamaian secara menyeluruh. Perlucutan senjata dan demobilisasi harus dapat menciptakan lingkungan yang aman dan stabil pada awalnya, namun keberlanjutan proses DDR tergantung pada prospek pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang bagi para mantan gerilyawan, warga sipil yang terkena dampak konflik, dan provinsi tersebut secara keseluruhan.

Tujuan spesifik sebuah proses DDR berbeda antara satu negara dengan negara yang lain dan harus ditetapkan secara eksplisit karena tujuan-tujuan itu

akan menentukan bagaimana bentuk proses reintegrasi tersebut dan seberapa besar dana yang tersedia untuk reintegrasi. Beberapa tokoh mengajukan gagasan bahwa DDR hanya sebuah program yang berkaitan dengan faktor keamanan semata-mata dan mestinya dibatasi hanya pada soal tersebut. Meskipun demikian, apabila tujuan satu-satunya adalah keamanan, maka DDR hanya akan terbatas pada “mengeluarkan elemen-elemen yang memiliki potensi berbahaya dari masyarakat”. Dalam pendekatan tersebut, tentara anak-anak, ibu-ibu remaja, mantan gerilyawan yang cacat dan kelompok-kelompok lain yang secara potensial hanya sedikit mendapatkan ancaman kekerasan tidak akan mendapatkan perhatian dan dana yang diperlukan untuk mendukung proses reintegrasi mereka.

Sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara tujuan-tujuan keamanan dan sosial-ekonomi, yang harus dikaitkan dengan konteks sosial, politik dan ekonomi Palestina yang spesifik. Penting juga untuk mempertegas apa yang menjadi tujuan utama program DDR di Israel-Palestina dan memastikan bahwa militer, berbagai lembaga kemanusiaan, dan lembaga pembangunan, serta para donor akan memberikan kontribusinya untuk tujuan yang sama.

Kondisi yang mendukung program Disarmament, Demobilization dan Reintegrasi sehingga dapat berjalan dengan sukses antara lain²⁸ :

1. Keamanan

Keamanan lingkungan meliputi ketenteraman untuk menyerahkan senjata mereka, yaitu para gerilyawan perang. Hanya kepercayaan yang dapat

²⁸ <http://www.un.org/Dpts/dsca/lessons/DD&R> diunduh 20 Januari 200

mematahkan lingkaran kekerasan, kelompok dan individu berkomitmen untuk melucuti dan memulai lagi kehidupan masyarakat. Kelompok ketiga mempunyai peranan yang penting dalam pemenuhan jaminan dengan gencatan senjata, memenuhi permintaan masyarakat umum, keselamatan individu, dan implementasi keadilan sebagai program pelucutan senjata. Pasukan penjagaan keamanan tak dapat mengharapkan berehentinya permusuhan, tapi kekuatan pengalang yang terpercaya sangat penting untuk mencegah penyatuan kembali proses kekerasan, yang mana termasuk membahayakan program DDR.

2. Pencantuman kelompok yang berperang

Dalam rangka membuat keamanan lingkungan dan mematahkan dilemma keamanan, sangat penting bahwa semua kelompok yang termasuk dalam program DDR melakukan pelucutan senjata dalam satu waktu. Hal ini dimungkinkan untuk menghindari pihak tertentu yang menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari program pelucutan senjata. Sangat penting bahwa semua kelompok membangun proses kepemilikan dan tidak merasa di diskriminasikan sebagai musuh.

3. Kesepakatan Politis

Kondisi keamanan dan pencantuman harus disatukan dalam kesepakatan politik untuk mengakhiri permusuhan dan perwujudan dari DDR. Pengalaman menunjukkan bahwa program DDR tak dapat membawa proses perdamaian. DDR hanya dapat diwujudkan dalam konteks negosiasi, tempat tinggal,

pelucutan senjata, atau kesepakatan damai. Hal itu dapat memperkuat perjanjian, sebagai jaminan keamanan dan ukuran pembangunan kepercayaan diri, tapi itu tak dapat mendahului persetujuan.

Membagi kepentingan politik, dan pemberian amnesi dan rekonsiliasi, dapat mendukung kondisi yang besar dalam pengimplementasian kesuksesan program DDR. Isu-isu tertentu harus secara langsung dilakukan proses perdamaian dan penyatuan dalam persetujuan politik, meliputi : penjelasan criteria yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam program; membentuk institusi yang kredibel dan bertanggungjawab ; pendefinisian tujuan nyata dan jadwal pengimplementasian. Persetujuan politik harus membawa praktek pelucutan senjata dan demobilisasi untuk mewujudkan tujuan yang merupakan isi dari persetujuan damai.

4. Pendekatan secara komprehensif

Program DDR tak akan berhasil tanpa koordinasi secara hati-hati yang merupakan fase dari DDR oleh Aktor berbeda dalam tataran local maupun nasional. Pelucutan senjata tanpa penyatuan kembali dan demobilisasi tanpa pelucutan senjata terlebih dulu dan perencanaan reintegrasi social dan ekonomi, adalah upaya yang sekejap saja.

Hal-hal yang penting yang mendukung pendekatan tersebut antara lain :

Institusi Negara yang berwenang dan kredibel dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program dalam tingkatan nasional ; kekuatan

negara perdamian dan personel militer untuk mengimplementasikan

pelucutan senjata ; organisasi masyarakat dan institusi yang menyediakan makanan, pendidikan, dan pusat kesehatan untuk demobilisasi bekas gerilyawan ; Komunitas lokal yang terlibat secara langsung kedalam integrasi social ekonomi untuk demobilisasi bekas gerilyawan.

5. Dana kemanusiaan/pinjaman

Sumber dana untuk mewujudkan program DDR merupakan hal yang sangat urgen. Hal itu dimaksudkan agar para gerilyawan tidak kembali melakukan praktek kekerasan dengan senjata. Itu adalah salah satu program recovery perekonomian.

F. Hipotesa

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat di ketahui apa saja usaha-usaha Partai Kadima dalam menciptakan proses perdamaian antara Israel dengan Palestina. Usaha Partai Kadima tersebut antara lain yaitu :

1. Melakukan pemulihan stabilitas keamanan dengan melakukan gencatan senjata antara Israel dengan Palestina dan pembangunan tembok pemisah untuk meminimalisasi konflik terbuka sebagai wujud dari proses disarmament.
2. Pembebasan para tawanan Palestina dan pemberian grasi kepada para pejuang Palestina dengan cara menghentikan pengejaran terhadap para pejuang militer Palestina yang termasuk dalam

G. Jangkauan penelitian

Agar dalam pembahasan tidak terlalu luas dan menyimpang jauh. Serta pembahasan masalah menjadi lebih mudah di pahami, maka penulis akan menekankan permasalahan-permasalahan yang muncul setelah ariel sharon menjabat sebagai Perdana Mentri pada tahun 2003 yang pada waktu itu mengemukakan "Gaza Disengagement Plan" yang membuat kontroversi di dalam dunia politik Israel, keluarnya Sharon dari Likud dan membentuk Partai saingan baru, Kadima yang berhaluan tengah sampai dengan di gantikannya Sharon oleh Ehud Olmert dalam posisi Perdana Menteri maupun petinggi Kadima Setelah pemilu 28 Maret 2006. Tidak menutup kemungkinan data dapat di ambil selama masih ada relefansi dengan permasalahan tersebut. Selama Ehud Olmert berkuasa menjadi seorang Perdana Menteri sebagai pengganti Ariel Sharon.

H. Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan perpaduan dari analisis literatur dan analisis sejarah (*librarian analysis and historical analysis*). Analisis literatur adalah suatu teknik penelitian dengan menggunakan acuan dari peninggalan-peninggalan tertulis.²⁹ Sedangkan Analisa Sejarah adalah penyelidikan yang mengaplikasikan perspektif historik pada suatu masalah.³⁰

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004, hal 4.

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, Edisi Tujuh, Tarsito, Bandung, 1990, hal, 132

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini berasal dari data sekunder. Ini berarti data-data yang dibutuhkan pada penelitian berasal dari buku, catatan-catatan (elektronik & non-elektronik), makalah dan dokumen-dokumen lain sebagai bahan penunjang yang amat penting dalam keberhasilan penelitian.

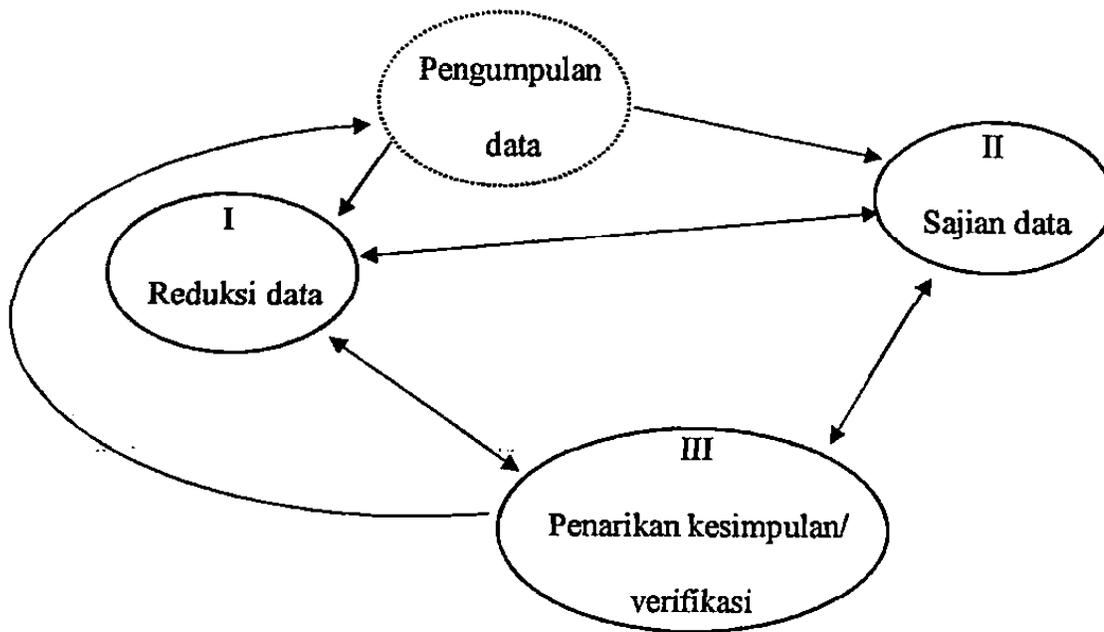
3. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti saran Miles & Habermas terutama teknik analisis dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen,³¹ yaitu (1) Reduksi data (*data reduction*), (2) Sajian data (*data display*), dan (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing*). Reduksi data yang dimaksud adalah dengan melakukan proses menyeleksi, mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian data meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja keberkaitan kegiatan, dan tabel. Kesemuanya dirancang untuk dapat merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam satuan bentuk yang kompak (menyeluruh). Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah kegiatan analisis yang dilakukan setelah reduksi data dan sajian data dibuat/disusun.

³¹ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah*

Karena penelitian kualitatif analisis datanya setiap saat dimulai sejak peneliti mulai mengumpulkan data sampai perolehan data itu dirasa cukup, maka tidak ada kesimpulan akhir yang baku sebelum proses pengumpulan data secara keseluruhan selesai/cukup.

Hubungan interaktif antar ketiga komponen tersebut dapat digambarkan dalam gambar 3 berikut.



Gambar Model Analisis Interaktif (sesuai Miles & Huberman)

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan isi skripsi sehingga antara satu dengan yang lainnya dapat saling berkaitan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pada Bab ini memuat Pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, sistematika penulisan, dan kerangka penulisan.

BAB II Pada Bab ini penulis akan membahas tentang Dinamika Konflik Israel dan Palestina. Yang meliputi sejarah Israel-Palestina, berdirinya negara Israel, pembagian wilayah, sejarah konflik Israel Palestina, dan juga membahas tentang sejarah usaha perdamaian Israel Palestina yang telah dilakukan oleh para pendahulunya.

BAB III Bab ini akan menjelaskan tentang dinamika kelompok politik di Israel, yang meliputi sistem politik Israel, kelompok politik Israel, berdirinya Partai Kadima, serta catatan sejarah pemimpin Partai Kadima yaitu Ariel Sharon dan Ehud Olmert.

BAB IV Bab keempat ini membahas tentang usaha-usaha perdamaian yang dilakukan oleh Partai Kadima baik semasa Sharon maupun ketika kepemimpinannya beralih ke Ehud Olmert.

BAB V Kesimpulan dan rekomendasi